



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISKANDAR ZULKARNAEN SIREGAR
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KONEKTIVITAS GLOBAL, KERJASAM DAN ALUMNI
3. NHK : 664383

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.016.159.280**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 563.320.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/75 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 183.079.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 256 m2/62 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.514.400
4. Bangunan Seluas 37 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
5. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Bangunan Seluas 35 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 695.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/49 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 927.666.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/83 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 1.260.579.880

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **308.000.000**

1. MOTOR, VESPA PRIMAVERA IGET 150 ABS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000



2. MOBIL, TOYOTA INNOVA / MAGA10R-BRXLBD 2.0 G CVT /
MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	250.000.100
D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.100.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.170.891.635
F. HARTA LAINNYA	Rp.	9.000.000
Sub Total	Rp.	7.854.051.015
III. HUTANG	Rp.	262.565.076
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.591.485.939

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.